

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah runtuhnya rezim Orde Lama terjadi pada tahun 1966, rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, dengan latar belakang militer, mulai berkuasa. Istilah Orde Baru terbentuk dari dua kata, yaitu orde yang berarti masa atau era, dan baru yang berarti sesuatu yang belum pernah ada sebelum ini. Istilah Orde Baru mengacu pada sistem pemerintahan baru di Indonesia, yang dimulai pada 11 Maret 1966 dan berakhir pada 20 Mei 1998.¹ Saat Orde Baru mengambil alih kekuasaan, mereka segera dihadapkan pada tantangan besar untuk menghentikan penurunan ekonomi dan berusaha dengan cepat untuk menciptakan stabilitas dalam bidang ekonomi dan politik. Demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, kebijakan pembangunan nasional ini sering disebut sebagai Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur untuk Pemerataan. Trilogi Pembangunan mencakup aspek, yaitu: yang pertama, stabilitas nasional yang aktif; yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi; dan yang ketiga, pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.²

Transmigrasi menjadi salah satu program pembangunan nasional yang dilakukan dalam upaya mengatur pertumbuhan dan penyebaran penduduk

¹ Purwanto.P. (2019). Strategi Dan Bentuk-Bentuk Informasi Transmigrasi Pada Masa Orde Baru Dalam Rangka Mensukseskan Program Pembangunan Nasional, *Jurnal Kepegawaian Dan Masyarakat Membaca*, Vol. 35, no. 2, h 001-015

² Hadi, D. W., & Kasuma, G. (2012). Propaganda Orde Baru 1966-1980. *Media Verleden*, 1(1), 1-109.

secara terprogram. Latar belakang program transmigrasi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, dimulai dari zaman kolonial Belanda sekitar tahun 1905 dan terus berkembang hingga saat ini di era otonomi daerah. Program ini awalnya dibuat untuk mengatasi masalah padatnya penduduk di Pulau Jawa dan juga untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di wilayah pedesaan.³ Transmigrasi merupakan program perpindahan penduduk secara sukarela dari daerah padat ke daerah jarang penduduk yang diatur pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Transmigrasi sebagai salah satu program pembangunan yang menjadi program unggulan Indonesia dalam beberapa puluh tahun ke belakang telah mencapai beberapa keberhasilan. Program Transmigrasi mengalami pertumbuhan yang cepat selama era Orde Baru. pada masa Orde Baru juga muncul banyak inovasi dalam pembangunan Transmigrasi, yang dimulai dari Transmigrasi biasa, lalu berkembang menjadi Transmigrasi Bedol Desa, Hutan Tanaman Industri (HTI), Perkebunan Industri Rakyat (PIR), dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri.⁴

Penyelenggaraan transmigrasi di Indonesia dimulai pada masa penjajahan, tepatnya di tahun 1905. Hal ini ditandai dengan pengiriman pertama yang melibatkan 155 Kepala Keluarga dari Kedu, Jawa Tengah, ke Gedong Tataan, Provinsi Lampung. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, rencana untuk pelaksanaan kolonisasi diteruskan, tetapi istilah kolonisasi

³ Yanuar. R. (2025). Transmormasi Sosial Ekonomi Desa Petaling Jaya: dari Transmigrasi Menuju Kemandirian. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Vol. 8 No. 7, h 8061-8071.

⁴ Sukarno, T. D., Siregar, N. A. M., & Yustina, F. (2023). Transpolitan: Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Masa Depan. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 14, No. 1, h 1-12.

diganti dengan transmigrasi. Istilah transmigrasi diperkenalkan pertama kali oleh Bung Karno pada tahun 1927.⁵ Kolonisasi merupakan istilah yang digunakan sebelumnya yang berarti proses penetapan kendali, pemukiman, dan penguasaan suatu wilayah dengan bentuk pemindahan penduduk karena kepadatan penduduk di wilayah aslinya. Kolonisasi merupakan salah satu program dari pemerintahan Belanda.

Transmigrasi di Indonesia telah berjalan cukup lama sebagai salah satu program kependudukan. Tujuan utamanya adalah mengurangi kepadatan di Pulau Jawa dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja di daerah lain di Indonesia. Setelah kemerdekaan, pada awal periode Orde Lama, transmigrasi tidak hanya memiliki tujuan demografis. Berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 1960, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan keamanan, kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat, serta memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa.⁶ Di kawasan transmigrasi, hubungan dalam masyarakat sering menjadi tantangan disebabkan keberagaman latar belakang, mulai dari perbedaan etnis hingga perbedaan kepercayaan. Di sini, masyarakat transmigran harus beradaptasi dan berinteraksi setiap hari dengan penduduk lokal maupun sesama pendatang. Di daerah transmigrasi, kerukunan beragama biasanya tumbuh karena adanya kebutuhan hidup yang sama. Warga perlu bekerja sama dalam mengolah lahan, membangun desa, dan

⁵ Rizal.M, Ahmad, Bunari. (2025). Sejarah Transmigrasi Di Desa Pulau Gadang Kabupaten Kampar (1992-1999). *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Vol 8. No. 1, h 989-998.

⁶ Rustiadi, Ernan dan Junaidi. 2011. *Transmigrasi dan Pengembangan Wilayah*. Makalah disampaikan dalam Pertemuan Penyempurnaan Konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 14 Februari 2011, Jakarta. h 2.

menjaga keselamatan tanpa menghiraukan latar belakang agama. Di tempat-tempat seperti ini, praktik moderasi beragama seringkali muncul secara alami karena semangat kerjasama untuk bertahan hidup bersama.

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dengan keberagaman latar belakang yang berbeda-beda, sifat toleransi merupakan hal yang harus ditanamkan pada masing-masing individu ataupun kelompok dalam keberagaman ini. Intoleran dapat mengakibatkan tertanamnya paham radikalisme hingga ekstremisme yang dikhawatirkan akan merusak Pancasila sebagai ideologi berbangsa. Radikalisme merupakan paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Esensi radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan.⁷ Ekstremisme adalah pandangan yang melewati batas hukum yang ada, sehingga memicu tindakan atau gerakan yang bisa menjadi ancaman. Seseorang yang terpengaruh oleh ide ini melihat segala sesuatu hanya dari sudut pandang kebenaran versi dirinya sendiri. Akibatnya, pandangan yang berbeda dengan pendapatnya dianggap salah dan melanggar aturan. Pemikiran ekstrimis dapat menginfeksi berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan bisa muncul dalam konteks agama, nasionalisme, dan kenegaraan.⁸

Oleh karena itu, penting untuk memahami moderasi dalam beragama agar konflik antara kelompok atau komunitas yang berbeda, termasuk yang

⁷ Yunus, A. F. (2017). Radikalisme, liberalisme dan terorisme: pengaruhnya terhadap agama Islam. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 13, No. 1, h 76-94.

⁸ Hasan, M. (2021). Prinsip moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa. *Jurnal Mubtadiin*, Vol. 7, No. 02, h 110-123.

berhubungan dengan agama, dapat dicegah. Moderasi beragama mencerminkan sikap yang menghargai perbedaan, mendorong perbincangan antara kelompok yang tidak sama, serta menolak tindakan kekerasan dan ekstremisme dalam agama. Ketika masyarakat memiliki pemahaman tentang moderasi beragama, mereka akan lebih mampu menilai semua aspek dari perbedaan yang ada dan menghindari terjerumus dalam lingkaran kebencian dan radikalisme. Memahami moderasi beragama sangat penting untuk menangani radikalisme dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Moderasi beragama berarti cara yang seimbang dalam memahami dan menjalani ajaran agama, yang menghargai perbedaan serta mendorong kerjasama antaragama.⁹

Moderasi adalah istilah atau praktik yang merujuk pada usaha untuk mempertahankan keseimbangan, kesederhanaan, atau keadilan dalam tindakan, pandangan, atau perilaku. Beragama adalah istilah yang menunjuk pada keyakinan, kepercayaan, dan praktik spiritual yang dipegang oleh individu atau kelompok dalam sebuah komunitas. Moderasi beragama adalah ide yang berkaitan dengan cara yang seimbang dan tidak ekstrim dalam menjalankan dan memahami agama. Ini mencakup fokus pada sikap tengah, toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap ekstremisme dan fanatisme di bidang agama sehingga menjaga kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat yang majemuk.¹⁰

⁹ Saumantri, T. (2023). Aktualisasi Moderasi Beragama Dalam Media Sosial. *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama*, Vol. 3, No. 1, h 64-75.

¹⁰ Nurlaili, N., Fitriana, F., Millah, C. U., & Nasution, E. M. (2024). Moderasi beragama di Indonesia: Konsep dasar dan pengaruhnya. *Moderation: Journal of Religious Harmony*, Vol. 1, No.1, h 19-24.

Secara dasar, Islam sudah mengajarkan tentang moderasi yang dapat ditemukan dalam al-Qur'an. Dalam al-Qur'an tersebut, moderasi dikenal dengan istilah *Al-Wasathiyyah*. Ulama terkenal, Syekh Yusuf Al-Qardhawi, menjelaskan bahwa *wasathiyyah*, yang juga sering disebut *at-tawâzun*, yaitu usaha untuk menjaga keseimbangan antara dua sisi atau ujung yang saling bertentangan, agar satu sisi tidak mendominasi yang lain. Memiliki sikap seimbang dalam menghadapi situasi ini berarti memberikan perhatian yang adil dan proporsional kepada kedua pihak tanpa berlebihan, baik itu dalam jumlah yang terlalu besar maupun terlalu kecil.¹¹

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama mempromosikan konsep Moderasi Beragama. Moderasi beragama bukan berarti mencampuradukkan ajaran agama, melainkan mengajak setiap umat untuk beragama dengan cara yang adil dan seimbang. Sikap ini mengedepankan kemanusiaan dan kemaslahatan bersama tanpa harus bersikap ekstrem.¹² Hal ini diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 yang menjadikan moderasi beragama sebagai program nasional untuk menjaga persatuan bangsa. Moderasi Beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang,

¹¹ Abror, M. (2020). Moderasi beragama dalam bingkai toleransi. *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 2, h 143-155.

¹² Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019), h 18.

dan menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kesepakatan berbangsa.¹³

Salah satu potret nyata perlunya penanaman moderasi beragama di Indonesia dapat dilihat di wilayah transmigrasi. Program transmigrasi telah menyatukan berbagai keberagaman orang-orang dari berbagai daerah, etnis, dan agama dalam satu wilayah permukiman yang sama. Situasi ini tampak jelas di Desa Pontian Mekar. Desa ini merupakan area transmigrasi di Provinsi Riau dengan mayoritas penduduk yang berasal dari Pulau Jawa. Awal masuknya transmigrasi di Desa Pontian Mekar diperkirakan mulai masuk pada tahun 1991. Pada awalnya Desa Pontian Mekar merupakan semak belukar dan kebun karet tua serta berbagai kebun buah-buahan yang di tengah-tengahnya mengalir sungai menuju Desa Sei Lala yang menjadi jalur utama bagi penduduk tradisional untuk berladang secara berpindah-pindah. Desa Pontian Mekar mulai berdiri pada tanggal 25 Desember 1991 melalui program transmigrasi STAP pemukiman yang ke-4 atau disebut SP 4. Pada awalnya penempatan penduduk dari berbagai daerah: Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lokal daerah setempat dan TSM (Trans Swakarya Mandiri) pecahan keluarga atau pecahan KK.¹⁴

Desa ini memiliki masyarakat yang beragam di antaranya terdapat komunitas Muslim, dan Kristen. Selain itu, terdapat percampuran suku antara

¹³ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama*.

¹⁴ Aripin. A, Monalisa. (2024). Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*. Vol. 1, No. 2, h 217-218.

Jawa, Sunda, Melayu, hingga Batak dan Nias yang hidup berdampingan. Interaksi sosial di Desa Pontian Mekar sangat menarik untuk diteliti. Meskipun memiliki perbedaan keyakinan yang mendasar, masyarakat di desa ini mampu menjaga perdamaian dalam waktu yang lama. Kegiatan seperti gotong royong membangun fasilitas desa, saling mengunjungi saat hari raya, dan komunikasi yang baik antarwarga menjadi bukti bahwa nilai-nilai moderasi sudah berjalan di sana. Namun, tantangan tetap ada. Masuknya informasi dari media sosial yang terkadang membawa paham radikal atau tidak toleran bisa saja merusak kerukunan yang sudah lama terjaga. Penelitian ini penting dilakukan untuk melihat langsung bagaimana warga di pelosok desa transmigrasi, seperti Desa Pontian Mekar, mempraktikkan moderasi dalam kehidupan sehari-hari mereka.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan suatu pokok permasalahan dari judul skripsi yaitu “Sejarah Transmigrasi dan Pengaruhnya Terhadap Moderasi Beragama di Desa Pontian Mekar Kabupaten Indragiri Hulu”. Untuk lebih terarahnya penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana sejarah proses transmigrasi di Desa Pontian Mekar?
- b. Bagaimana pengaruh transmigrasi terhadap kehidupan moderasi beragama di Desa Pontian Mekar?

2. Batasan Masalah

Membuat batasan masalah penting agar topik penelitian tetap fokus dan tidak menyimpang dari tujuan yang sudah ditentukan. Dalam penelitian ini, penulis menetapkan beberapa masalah sebagai berikut:

a. Batasan Temporal

Batasan temporal adalah batasan pengambilan waktu dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, batasan waktu yang digunakan yaitu dari tahun 1991 sampai 2025. Tahun 1991 merupakan awal masuknya program transmigrasi yang menjadi titik awal terbentuknya dinamika kehidupan masyarakat di Desa Pontian Mekar. Sementara itu, rentang waktu diperpanjang hingga tahun 2025 untuk mengkaji perkembangan kehidupan masyarakat masa kini, khususnya dalam merekam dinamika kerukunan, pola interaksi sosial, serta perwujudan praktik moderasi beragama di tingkat lokal hingga rekapitulasi data desa tahun 2025.

b. Batasan Spasial

Batasan spasial adalah batasan wilayah atau geografis dalam melakukan sebuah penelitian, adapun batasan spasial yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan alasan fokus pada transmigrasi dan pengaruh terhadap moderasi beragama yang terjadi di lokasi ini untuk menghasilkan data yang lebih terarah dan mendalam.

c. Batasan Tematis

Batasan tematis adalah batasan pada judul dan tema terkait dalam penelitian, tema dalam penelitian ini adalah “Sejarah Transmigrasi dan Pengaruhnya Terhadap Moderasi Beragama di Desa Pontian Mekar Kabupaten Indragiri Hulu”, Batasan tematis dalam penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama kehidupan masyarakat di Desa Pontian Mekar. Pertama, sejarah proses pelaksanaan transmigrasi. Kedua, dampak transmigrasi terhadap kehidupan moderasi beragama yang tercipta di lokasi transmigrasi ini.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah antara lain untuk menjawab, menjelaskan, serta memamparkan poin-poin dari pertanyaan rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana sejarah dan proses pelaksanaan transmigrasi di Desa Pontian Mekar?
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak transmigrasi terhadap kehidupan moderasi beragama di Desa Pontian Mekar?

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Menambah wawasan mendalam khususnya bagi penulis sendiri mengenai sejarah lokal di kabupaten Indragiri Hulu, tentang dinamika kehidupan transmigran. Penelitian ini juga dapat menyumbang data dan analisis baru mengenai proses pelaksanaan transmigrasi, serta dampak transmigrasi

terhadap kehidupan moderasi beragama pada masyarakat khususnya di Desa Pontian Mekar.

2. Manfaat penelitian ini bagi para pembaca dan masyarakat di luar sana adalah penelitian ini dapat memberikan informasi baru, memperluas pengetahuan mengenai sejarah pelaksanaan transmigrasi hingga bentuk kehidupan moderasi beragama dalam masyarakat transmigran yang terjadi di Desa Pontian Mekar, khususnya bagi warga Desa Pontian Mekar penelitian dapat memberikan dokumentasi sejarah mengenai perjalanan desa mereka dalam membangun ekonomi serta kerukunan.
3. Manfaat penelitian ini bagi penulis sendiri sebagai salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S. Hum) dalam Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, penulis perlu menyampaikan penegasan istilah-istilah yang terdapat dalam kata kunci yang ada pada judul "Sejarah Transmigrasi dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Moderasi Beragama di Desa Pontian Mekar Kabupaten Indragiri Hulu" sebagai berikut:

1. Sejarah

Kata "Sejarah" diambil dari bahasa Arab "*syajaratun*", yang berarti pohon. Jika disusun secara sistematis, sejarah mirip dengan pohon, memiliki cabang dan ranting, berawal dari sebuah bibit, kemudian tumbuh dan

berkembang, sebelum akhirnya layu dan jatuh. Sejalan dengan istilah sejarah adalah silsilah, kisah, dan hikayat yang berasal dari bahasa Arab. sejarah merupakan catatan berbagai peristiwa yang terjadi di masa lalu dalam periode tertentu di tempat tertentu. Sejarah mencakup perjalanan hidup manusia dalam mengisi perkembangan dunia dari zaman ke zaman. Setiap bagian sejarah memiliki makna dan nilai, sehingga manusia bisa menciptakan sejarahnya sendiri dan sejarah juga dapat membentuk manusia.¹⁵

2. Transmigrasi

Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian. Transmigrasi adalah perpindahan pendudukan secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Transmigrasi merupakan proses pemindahan penduduk yang didukung oleh pemerintah. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah karena penyebaran penduduk di wilayah negara ini dinilai tidak merata, terdapat daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan daerah yang kurang penduduk, hal ini berdampak pada kualitas hidup masyarakat serta perkembangan daerah tersebut tidak sesuai harapan. Tujuan dari transmigrasi tidak sebatas memindahkan petani dari pulau Jawa yang terlalu padat, tetapi juga berfokus pada pengembangan ekonomi. Tidak hanya untuk kepentingan petani-petani

¹⁵ Sulthon Mas'ud (2014). *Sejarah Peradaban Islam*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel), h 5.

dari pulau Jawa yang kekurangan lahan, namun juga ditujukan untuk memajukan wilayah yang menjadi target para transmigran.¹⁶

3. Moderasi Beragama

Moderasi beragama adalah cara pandang, perilaku, dan tindakan dalam mengamalkan agama di kehidupan sosial dengan cara mewujudkan inti dari ajaran agama yang menjaga harga diri manusia serta memperjuangkan kebaikan bersama, yang berlandaskan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan mematuhi konstitusi sebagai bentuk kesepakatan bernegara. Dalam penelitian ini, istilah tersebut merujuk pada bentuk toleransi, harmoni, dan kerja sama antarumat beragama yang dipraktikkan oleh masyarakat di lokasi transmigrasi.¹⁷

4. Desa Pontian Mekar, Kabupaten Indragiri Hulu

Merupakan batasan spasial atau lokasi penelitian yang secara administratif terletak di Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik unik desa tersebut sebagai wilayah transmigrasi yang mampu mempertahankan stabilitas sosial dan kerukunan beragama sejak masa penempatannya. Berdasarkan penjelasan tentang istilah yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini difokuskan pada kajian sejarah mengenai pelaksanaan program transmigrasi dan pengaruhnya terhadap moderasi beragama di Desa Pontian Mekar, Kabupaten Indragiri Hulu.

¹⁶ Fahrozi, N. (2022). Analisis Pembinaan Transmigran Studi Kasus Desa Transmigrasi Pelabai Kabupaten Lebong. *Jurnal STIA Bengkulu: Committe to Administration for Education Quality*, Vol. 8, No. 1, h 48-55.

¹⁷ Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dalam beberapa tahapan yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, serta historiografi. Metode penelitian ini merupakan Langkah-langkah yang digunakan sejarawan untuk mengetahui peristiwa yang terjadi di masa lampau.

1. Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani Kuno *heuriskein*, yang berarti mencari tahu atau menemukan.¹⁸ Tahap heuristik merupakan langkah awal dalam metode sejarah yang difokuskan pada kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan objek penelitian. Dalam tahapan ini, peneliti mencari dan mengumpulkan sumber primer, sekunder, dan tersier terkait dinamika transmigrasi dan kehidupan keagamaan di Desa Pontian Mekar. Proses heuristik dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber tertulis yang dapat dipercaya, seperti buku-buku ilmiah yang tersedia di perpustakaan, jurnal-jurnal akademik yang membahas tema serupa, beberapa skripsi yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian, serta melakukan wawancara terhadap masyarakat Desa Pontian Mekar sebagai tokoh asli transmigran hingga tokoh-tokoh yang berkaitan dengan proses pelaksanaan transmigrasi yang terjadi di Desa ini. Melalui tahapan ini, peneliti berusaha memperoleh pemahaman awal yang komprehensif sebelum melanjutkan ke tahap analisis lebih mendalam.

¹⁸ Sayono, J. (2021). Langkah-langkah heuristik dalam metode sejarah di era digital. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*. Vol. 15. No. 2, h 369-378.

Sumber primer dalam penelitian ini mencakup berbagai arsip dokumen dan foto sejarah, serta hasil wawancara langsung dengan para pelaku utama dinamika desa. Arsip berupa foto “kartu seleksi transmigrasi” memberikan bukti autentik mengenai latar belakang, asal-usul, serta identitas resmi warga awal yang ditempatkan dalam program transmigrasi di Desa Pontian Mekar. Selanjutnya, arsip foto “surat tamat latihan transmigrasi” menunjukkan kesiapan, pembekalan keterampilan, dan legalitas warga transmigran sebelum menduduki wilayah permukiman baru. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber primer visual berupa koleksi foto para pimpinan desa mulai dari era Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT) hingga kepala desa saat ini memberikan visualisasi rekam jejak kepemimpinan serta transisi tata kelola pemerintahan desa dari masa ke masa. Selain data visual, sumber primer dokumen dalam penelitian ini mengacu pada kerangka hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (beserta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahannya) untuk memahami landasan kebijakan penataan kawasan permukiman transmigran. Selanjutnya, rujukan juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) sebagai dasar awal mengenai kebijakan moderasi beragama, serta Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama guna mengkaji implementasi, keberhasilan, dan penguatan kerukunan hidup beragama secara nasional di tingkat permukiman.

Sumber primer kemudian diperkuat melalui wawancara mendalam dengan beberapa tokoh kunci, seperti Suparno Sarbi sebagai salah satu transmigran pertama dan tokoh agama Islam di Desa Pontian Mekar, Ardi Manungkalit yang merupakan transmigran lokal sekaligus tokoh agama Kristen dan pendiri GBI di Desa Pontian Mekar, Sahala Sihite tokoh agama Kristen dan pendeta HKBP saat ini di Desa Pontian Mekar, Marbun selaku bagian dari pengurus Gereja HKBP saat ini, Susianto yang merupakan salah satu ketua kelompok tani di Desa Pontian Mekar, Wagiran selaku sekretaris desa era KUPT hingga menjadi desa defenitif sekaligus transmigran tahap Trans Swakarsa Berbantuan (TSB) dalam skema Perkebunan Industri Rakyat (PIR), Kusmara yaitu transmigran asal Jawa Barat pada tahap PIR, Sugiarto yang merupakan transmigran pada tahap Trans Swakarsa Mandiri (TSM), serta Sujiman seorang transmigran tahap Trans Jaya yang memberikan keterangan langsung berhubungan dengan dinamika perihal pelaksanaan pemindahan penduduk di Desa Pontian Mekar hingga kehidupan beragama dan proses pendirian sarana ibadah di Desa Pontian Mekar.

Sumber sekunder dalam penelitian ini melibatkan narasumber yang merupakan generasi penerus dan tidak mengalami langsung masa awal pembentukan desa transmigrasi, seperti Habib Rifqi selaku Kepala Desa Pontian Mekar saat ini dan Hendry Safrudin selaku staf pemerintahan desa bagian statistik. Wawancara dengan keduanya memberikan gambaran dari sudut pandang generasi kedua mengenai dinamika tata kelola pemerintahan desa, gambaran desa dan kehidupan masyarakat hingga upaya dan tantangan

pihak pemerintahan desa dalam menjaga kemajemukan yang ada di Desa Pontian Mekar, serta data statistik demografi penduduk Desa Pontian Mekar terkini.

Selain hasil wawancara, penelitian ini juga memanfaatkan sumber sekunder tertulis berupa dokumen catatan ringkas sejarah desa yang disusun oleh Pemerintah Desa Pontian Mekar juga menjadi sumber yang berharga untuk memberikan gambaran umum mengenai rekam jejak perkembangan desa, struktur kepemimpinan, dan latar belakang kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. Untuk memperkuat analisis ilmiah dan gambaran konseptual, penelitian ini menggunakan buku sekunder karya Nurul Azmi Arsal, dkk. yang berjudul "Jejak Transmigrasi: Sejarah dan Kehidupan di Desa Transmigran" (Global Teras Fana, 2025) guna memberikan perbandingan mengenai pola kehidupan sosial masyarakat di wilayah transmigrasi. Selain itu, digunakan pula buku "Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama" (Depag RI, 2002) yang memuat aturan pendirian rumah ibadah untuk menyelaraskan temuan fakta historis di lapangan dengan kajian ilmiah yang relevan.

Dalam pengumpulan sumber penelitian ini, teknik yang dilakukan meliputi studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Melalui studi kepustakaan, peneliti mengumpulkan data serta literatur yang berkaitan erat dengan objek kajian melalui penelusuran di perpustakaan. Selain itu, pengumpulan sumber juga dilakukan secara digital melalui internet dengan memanfaatkan media online seperti *Google Scholar* guna mengatasi

keterbatasan sumber fisik yang tersedia. Tahapan kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan melalui metode sejarah lisan. Peneliti melakukan wawancara langsung secara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti kepala desa dan perangkat pemerintahan Desa Pontian Mekar selaku lokasi penelitian. Wawancara juga diarahkan kepada para tokoh transmigran terdahulu, tokoh lintas agama (seperti tokoh pendiri gereja GBI dan pendeta HKBP), serta masyarakat setempat yang menyaksikan dan merasakan langsung dinamika perkembangan kehidupan beragama di wilayah tersebut.

2. Kritik Sumber

Kritik sumber yaitu tahapan kegiatan meneliti sumber, informasi, dan jejak yang ada.¹⁹ Langkah ini melibatkan analisis kritis terhadap sumber-sumber yang sudah dikumpulkan guna menguji otentitas dan kredibilitasnya. Dalam proses ini diperlukan kritik eksternal maupun internal. Tujuan utama dari kritik adalah untuk menemukan kebenaran (*truth*), dimana peneliti harus mampu membedakan antara fakta dan kebohongan, serta membedakan apa yang mungkin terjadi dan apa yang meragukan atau mustahil terjadi. Fungsi kritik adalah untuk dapat mempertanggung jawabkan hasil temuan dalam penelitiannya untuk dapat dipercaya oleh masyarakat umum.²⁰ Tahapan kritik sumber ini ada dua yaitu kritik eksternal dan juga kritik internal. Kritik eksternal yaitu untuk mengetahui keaslian sedangkan kritik internal digunakan untuk mencari kebenaran dari sumber yang diperoleh.

¹⁹ Nina Herlina, *Metode Sejarah*, (Bandung, Satya Historika, 2008), h. 30.

²⁰ Umi Hartati, *Metode Penelitian Sejarah: Kritik Sumber*, (Lampung: Universitas Muhammadiyah Metro, 2023), h. 2.

Dalam kritik eksternal, Peneliti menguji keaslian fisik dan legalitas dokumen arsip yang diperoleh. Pengujian dilakukan pada dokumen arsip seperti Kartu Seleksi Transmigran Swakarsa PIR SUS/TRANS (milik Wagiran dan Suparno) serta Surat Tanda Tamat Latihan Departemen Transmigrasi tahun 1991. Verifikasi fisik dibuktikan dengan menguji keberadaan stempel basah Departemen Transmigrasi, tanda tangan pejabat terkait seperti kepala pusat latihan transmigrasi, keberadaan cap tiga jari dan pasfoto pemilik, serta format ketikan kertas khas era tersebut. Selain itu, foto-foto pimpinan desa era KUPT hingga kepala desa saat ini juga dikonfirmasi keasliannya melalui kesesuaian kondisi fisik foto, dan konfirmasi ulang kepada perangkat desa senior seperti Wagiran.

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan tahap berikutnya dalam metode penelitian sejarah setelah kritik sumber. Pada tahap ini, dilakukan penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang telah dihasilkan dari kritik sumber. interpretasi sebagai usaha untuk memahami fakta-fakta sejarah dalam rangka membangun kembali realitas masa lalu. Memiliki dua makna, pertama interpretasi dalam konteks rekonstruksi sejarah masa lalu, berarti mengembalikan kembali hubungan antar fakta-fakta kehidupan masa lalu suatu kelompok, masyarakat maupun bangsa. Kedua, interpretasi lebih berhubungan dengan penjelasan sejarah. Pada dasarnya suatu interpretasi lebih mengarah kepada argumen

yang menjawab pertanyaan-pertanyaan penyebab.²¹ Interpretasi sejarah memiliki dua metode yang digunakan yaitu analisis dan sintesis. Analisis mengacu pada proses penguraian, sementara sintesis adalah penggabungan dari berbagai sumber rujukan serta data-data yang sejalan dan relevan dengan apa yang dibutuhkan penulis dalam karya tulis ilmiah mereka. Tujuan dari sintesis adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan merangkum hasil-hasil dari berbagai penelitian yang ada.²²

4. Historiografi

Setelah menyelesaikan beberapa langkah dalam penelitian ini, peneliti akan menulis hasil yang telah dikumpulkan dan dikerjakan. Metode yang digunakan yaitu Historiografi yang merupakan tahap akhir dalam metode penulisan sejarah. Historiografi adalah proses penulisan sejarah yang merupakan cara sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menginterpretasi data sejarah.²³ Historiografi merupakan tahapan kegiatan penulisan.²⁴ Pada tahap ini, seluruh sintesis fakta yang telah teruji dituangkan ke dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi mengenai sejarah transmigrasi dan moderasi beragama di Desa Pontian Mekar Kabupaten Indragiri Hulu. Penulisan skripsi ini disusun menggunakan pendekatan kronologis berdasarkan urutan waktu dan tematis berdasarkan topik pembahasan Melalui

²¹ Sika Nurhasanah, S. N. (2022). *Kehidupan Ekonomi Dan Sosial Budaya Masyarakat Muara Sabak Tahun 1999-2020 (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari)*.

²² Siswanto (2010). Systematic Review Sebagai Metode Penelitian Untuk Mensintesis Hasil-Hasil Penelitian, *Jurnal Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*. Vol 13, No 4, 326.

²³ Sukmana. W. J. (2021). Metode Penelitian Sejarah. *Seri Publikasi Pembelajaran*. Vol 1, No 2, h 1-3.

²⁴ Nina Herlina, *Metode Sejarah*, (Bandung, Satya Historika, 2008), h. 30.

penyusunan yang sistematis ini, diharapkan historiografi Desa Pontian Mekar dapat menyajikan narasi sejarah lokal yang objektif, ilmiah, serta mudah dipahami oleh pembaca.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian, teori dan konsep memainkan peran yang sangat penting untuk memahami data. Maka dari itu, sebelum membahas hasil penelitian, peneliti perlu menjelaskan teori-teori dasar yang berhubungan dengan masalah utama. Berdasarkan kebutuhan ini, bagian berikutnya akan menyajikan tinjauan pustaka yang mencakup penjelasan tentang teori, konsep, dan penelitian sebelumnya yang relevan.

Berdasarkan buku *Transformasi Kebijakan Agraria dan Transmigrasi di Indonesia (2019)* mengatakan bahwa Kebijakan transmigrasi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, dimulai dari masa kolonial Belanda sebagai cara untuk mengatasi ketidakmerataan jumlah penduduk di Pulau Jawa. Pada tahun 1905, pemerintah kolonial mencoba memindahkan warga dari Karesidenan Kedu ke Lampung. Sejak merdeka, program ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia dengan tingkat yang berbeda di setiap era seperti era orde lama yang mengalami krisis ekonomi, namun presiden Sukarno tetap melakukan transmigrasi sebagai solusi eksploitasi tanah untuk menghidupi warga negara. Pada era orde baru transmigrasi diangkat sebagai misi utama dalam pembangunan nasional dan sering dianggap sebagai pengganti skema

reformasi lahan. Pemerintah percaya bahwa banyaknya lahan di luar Jawa akan menjamin kehidupan bagi para petani.²⁵

Menurut Lilis Ina Riswati 2015 dalam buku yang berjudul “*Sejarah Transmigrasi di Jawa Tengah*” yang diterbitkan oleh Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, mengatakan transmigrasi menurut KBBI diartikan sebagai perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah berpenduduk jarang, berbeda dengan istilah umum migration dalam bahasa Inggris artinya perpindahan seseorang dari suatu negara untuk menetap. Istilah ini pertama kali digagas oleh Bung Karno pada tahun 1927 dan terus dikembangkan hingga masa pasca-kemerdekaan. Meski pada masa Orde Lama sempat diusulkan pergantian nama menjadi "alih setra" yang berarti “dipindah Padang” untuk menasionalisasi bahasa, namun Presiden Soekarno tetap mempertahankan istilah "transmigrasi" karena menurutnya istilah hanyalah alat komunikasi substantif.²⁶

Hal ini menunjukkan bahwa istilah transmigrasi memiliki arti konsep yang khusus dan berbeda dari sekedar migrasi biasa. Penolakan untuk mengganti nama menjadi "alih setra" menandakan bahwa istilah transmigrasi tetap dipertahankan bukan hanya karena alasan bahasa, tetapi juga karena substansi maknanya yang menyangkut kebijakan redistribusi penduduk yang dilakukan dengan rasional dan terencana. Dengan demikian, batasan dalam pemahaman transmigrasi terletak pada adanya perpindahan wilayah yang

²⁵ Yulia Rahma Fitriana. *Et al, Transformasi Kebijakan Agraria dan Transmigrasi di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2019), h

²⁶ Lilis Ina Riswati, *Sejarah Transmigrasi di Jawa Tengah*, (Semarang: Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, 2015), h. 1.

terikat oleh kebijakan resmi pemerintah untuk mengatasi ketidakseimbangan kepadatan penduduk, yang sampai saat ini masih menggunakan istilah itu sebagai acuan dalam komunikasi publik dan hukum.

Diah Eka Poespaningroem dalam bukunya yang berjudul “*SIPUKAT: Solusi Perencanaan Transmigrasi (2021)*” menyebutkan bahwa Program transmigrasi bertujuan pemeratakan berbagai aspek pembangunan, mencakup pendidikan, kesehatan, olahraga dan kesenian, hingga kehidupan mental-spiritual atau keagamaan. Selain menjadi penggerak penting dalam pembangunan nasional, para transmigran sebagai pelaku utama juga berkontribusi langsung dalam mendorong kemajuan dan pengembangan di daerah tujuan.²⁷ Program Transmigrasi memperlihatkan bahwa selain fokus pada pengembangan wilayah dan pemerataan penduduk, transmigrasi pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan ekonomi para transmigran di daerah baru. Peluang pengelolaan lahan dan akses mata pencaharian baru menjadi pendorong utama bagi peningkatan ekonomi keluarga transmigran. Di sisi lain, proses pembangunan ini tidak hanya menyentuh sektor fisik dan finansial, melainkan juga mencakup dimensi sosial serta keagamaan. Keberadaan transmigran yang berkembang secara ekonomi turut memperkuat tatanan sosial baru melalui pemenuhan kebutuhan spiritual dan tempat ibadah, sehingga integrasi masyarakat serta kesejahteraan yang merata dapat terwujud di daerah tujuan.

²⁷ Diah Eka Poespaningroem, *SIPUKAT: Solusi Perencanaan Transmigrasi* (Bogor: Zenawa Publishing, 2021), h. 3.

Ibrahim Chalid dalam bukunya berjudul “*Transmigrasi: Dari Diferensiasi Menuju Kohesi Sosial (2023)*” menjelaskan bahwa Histori transmigrasi di Indonesia memiliki kekhasannya tersendiri yang bermula sejak 1905 hingga 1941 pada era pemerintahan Hindia Belanda dengan sebutan *Kolonisatie* (Kolonisasi). Kemudian berlanjut tahun 1942-1945 pada masa pemerintahan Jepang dengan sebutan “*Kokuminagakari*”. Berbeda dengan era Belanda yang memindahkan penduduk berbasis keluarga atau rombongan desa, Jepang menerapkan transmigrasi secara individu dengan menyeleksi orang-orang berfisik kuat, sehingga peserta yang terserap mayoritas adalah kaum laki-laki. Para pekerja yang dikenal sebagai romusha ini tetap menerima upah atas pekerjaan mereka, tetapi sistemnya memberlakukan pemotongan sebagian penghasilan untuk dikirimkan kepada keluarga di kampung halaman. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah tetap melanjutkan program ini dengan nama transmigrasi dengan cara yang relatif sama seperti era sebelumnya, yaitu melalui pengiriman penduduk secara berkelompok berbasis keluarga (KK). Pada masa Orde Baru hingga sebelum tahun 2000-an, program ini dijalankan secara besar-besaran untuk mengatasi masalah kemiskinan di perdesaan Jawa. Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan transmigrasi terus mengalami perkembangan dan perubahan, baik dari segi aturan hukum, arah kebijakan, pola pikir, hingga tujuan praktis di lapangan.²⁸

²⁸ Ibrahim Chalid, *Transmigrasi: Dari Diferensiasi Menuju Kohesi Sosial* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), h. 12-13.

Dalam Jurnal “Perpindahan penduduk dalam tiga masa: kolonisasi, kokuminggakari, dan transmigrasi di Provinsi Lampung (1905-1979). *Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research* Volume 6 No 3” oleh M. Halwi Dahlan memaparkan bahwa Kolonisasi, pengerahan romusha, dan transmigrasi merupakan program perpindahan penduduk yang dilaksanakan oleh pemerintah di kawasan yang sama dengan berbagai sebutan. Perbedaannya adalah bahwa kolonisasi dan transmigrasi dimaksudkan untuk menyebarkan populasi serta membuka area baru, sedangkan *kokuminggakari* fokus pada pengalihan tenaga kerja semata. Pada waktu kolonisasi dan transmigrasi, perpindahan penduduk disertai keluarganya, sementara dalam *kokuminggakari* hanya para pekerja yang dialihkan tanpa anggota keluarga yang ikut. Ketiga aktivitas ini memiliki pandangan yang sama bahwa jumlah penduduk di Jawa melebihi batas proporsional jika dibanding dengan luasan lahan yang tersedia untuk pertanian. Walaupun masing-masing memiliki alasan tersendiri, ketiganya sepakat bahwa kolonis, romusha, dan transmigran adalah aset utama dalam usaha pengembangan infrastruktur di wilayah yang kekurangan tenaga kerja tetapi memiliki lahan yang sangat luas.²⁹

Menurut Agung Aripin dengan jurnal “Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu (2024)” dengan menggunakan penelitian teknik wawancara, observasi dan dokumentasi mengatakan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dasar penting dalam mendukung keberlanjutan daerah transmigrasi.

²⁹ Dahlan, M. H. (2014). Perpindahan penduduk dalam tiga masa: kolonisasi, kokuminggakari, dan transmigrasi di Provinsi Lampung (1905-1979). *Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research*, Vol. 6, No. 3, h 335-348.

Pemerintahan desa berperan sebagai pelaksana kebijakan yang berhubungan langsung dengan masyarakat transmigran. Pemerintah Desa Pontian Mekar mengembangkan kebijakan melalui musyawarah desa. Kepekaan, staf Desa Pontian Mekar sangat penting untuk menyelaraskan aktivitas dan program dengan keperluan masyarakat. Efektivitas dan efisiensi, minimnya penggunaan sumber daya alam oleh penduduk desa, Akuntabilitas proses pengambilan keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan analisis manajemen pemerintahan desa Pontian Mekar terletak pada pemimpin desa.³⁰

Selanjutnya, masih membahas tentang transmigrasi dengan jurnal “Transformasi Sosial Ekonomi Desa Petaling Jaya: dari Transmigrasi Menuju Kemandirian”, Vol 8 No 7 2025 yang ditulis oleh Rizki Yanuar untuk mengevaluasi dampak perkembangan desa terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sejak didirikan melalui program transmigrasi pada tahun 1986, Desa Petaling Jaya telah mengalami pertumbuhan pesat, terutama di sektor sosial dan ekonomi. Pada awalnya, para transmigran ditempatkan di Kumpeh Ulu, namun karena banjir yang sering mengganggu pertanian dan perkebunan, mereka dipindahkan ke Petaling Jaya, yang kemudian berkembang lebih cepat dibandingkan desa-desa lain yang sejenis. Di bidang pertanian, khususnya pada kelapa sawit, menjadi sumber utama pendapatan yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari segi sosial, terjalin interaksi antarwarga, perpaduan budaya dengan pendatang, serta peningkatan kesadaran tentang kepentingan pendidikan dan kesehatan.

³⁰ Aripin. A. Monalisa. (2024). Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, Vol. 1, No. 2, h 215-225.

Pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas pendidikan, juga meningkatkan mobilitas serta kualitas hidup, baik bagi masyarakat desa ini maupun desa-desa sekitarnya. Dengan perkembangan yang berkelanjutan, Desa Petaling Jaya diharapkan menjadi teladan keberhasilan dalam pengelolaan daerah transmigrasi dan dapat berfungsi sebagai model untuk pengembangan desa serupa di masa depan.³¹

Muhammad Suhaibe dalam skripsinya yang berjudul “Kehidupan Sosial Masyarakat Transmigrasi Desa Marga Manunggal Jaya Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi 1988-2000” mengatakan bahwa Sejak awal program transmigrasi telah menjadi kebijakan sosial dan pembangunan yang diusulkan oleh para pendukung etika politik, dengan tujuan mengurangi penderitaan penduduk di pulau Jawa. Penyebab dari kesulitan hidup mereka adalah jumlah penduduk yang terlalu banyak di tengah sumber daya alam yang terbatas. Transmigrasi dianggap sebagai cara untuk mengurangi tekanan populasi di Jawa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat asli. Individu yang dipindahkan diharapkan berkontribusi dalam pembangunan di pulau-pulau baru mereka serta meningkatkan kehidupan mereka sendiri.³²

Dalam jurnal M Zacky Maulana, *et al*, dengan judul Analisis Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Dalam Penempatan Tenaga Kerja Lokal Di Duri Vol 7 No 2 Tahun 2025 dengan menggunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara,

³¹ Yanuar. R. (2025), Transformasi Sosial Ekonomi Desa Petaling Jaya: dari Transmigrasi Menuju Kemandirian, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 8, No. 7, h 8061-8071.

³² Muhammad Suhaibe (2021). *Kehidupan Sosial Masyarakat Transmigrasi Desa Marga Manunggal Jaya Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi 1988-2000* (Skripsi, Universitas Jambi).

observasi dan dokumentasi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan berbagai program pelatihan dan kerja sama dengan perusahaan lokal, namun masih ada masalah seperti terbatasnya lapangan kerja, kurangnya keterampilan tenaga kerja lokal, dan belum optimalnya pelaksanaan kebijakan penempatan tenaga kerja. Penelitian ini merekomendasikan agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperkuat sinergi dengan sektor swasta, memperluas program pelatihan yang sesuai kebutuhan industri, serta memperkuat pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan penempatan tenaga kerja lokal agar dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat setempat.³³

Menurut M Rizal, *et al* dalam penelitian jurnal mereka tentang Sejarah Transmigrasi di Desa Pulau Gadang Kabupaten Kampar (1992-1999) Tahun 2025. Dalam penelitiannya yang menggunakan penelitian sejarah mengungkapkan bahwa transmigrasi di Desa Pulau Gadang Kabupaten Kampar terjadi pada 31 Agustus 1992. Proses transmigrasi ini dipicu oleh pembangunan bendungan PLTA Koto Panjang di Kabupaten Kampar yang mengakibatkan lokasi tempat tinggal masyarakat Desa Pulau Gadang terendam air. Proses ini tidak berjalan semudah yang diharapkan oleh pemerintah daerah Kampar, karena Rekayasa Sosial yang pertama pada tahun 1983 dan yang kedua pada tahun 1990 menunjukkan bahwa warga Desa Pulau Gadang kurang yakin terhadap program ini. Konsekuensi dari pemindahan penduduk ini terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat

³³ Maulana. Z. M. Museliza. V. Murani. R. (2025), Analisis Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Dalam Penempatan Tenaga Kerja Lokal Di Duri, *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 7, No. 2, h 196-201.

Desa Pulau Gadang mencakup pendidikan, kesehatan, tradisi, lingkungan sosial dalam pertanian, serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat Desa Pulau Gadang.³⁴

Norsidi, *et al* (2023) menjelaskan dalam jurnal yang berjudul “Dampak Masyarakat Transmigran Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi dan Budaya di Desa Tunggal Bhakti Kecamatan Kembayan. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, Volume 10, No 3” tentang dampak transmigrasi. menjelaskan bahwa para transmigran yang awalnya tidak memiliki lahan dan berkeuangan rendah memanfaatkan alokasi lahan dari pemerintah di Desa Tunggal Bhakti untuk memperbaiki taraf hidup melalui sektor pertanian dan perkebunan. Kehadiran mereka memicu transformasi ekonomi lokal dari pertanian tradisional menuju sektor yang lebih beragam, seperti perdagangan dan jasa. Selain berdampak pada ekonomi, proses transmigrasi ini mendorong terwujudnya interaksi sosial yang inklusif dan harmonis. Melalui aktivitas harian dan kegiatan kemasyarakatan, warga transmigran dan penduduk lokal saling memperkenalkan serta menerima kebudayaan masing-masing secara terbuka dan toleransi.³⁵

Fahrur Rozi, *et al* (2025) juga menjelaskan fungsi dari transmigrasi dalam jurnal yang berjudul “Dinamika Transmigrasi di Desa Makmur Jaya: Sejarah, Perkembangan, dan Dampaknya”. Selain memberikan kontribusi di sektor pertanian, transmigrasi juga berdampak pada pengembangan

³⁴ Rizal. M. DKK. (2025), Sejarah Transmigrasi di Desa Pulau Gadang Kabupaten Kampar (1992-1999), *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 8, No. 1, h 989-998

³⁵ Norsidi, N. N, *et al* (2023). Dampak Masyarakat Transmigran Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Dan Budaya Di Desa Tunggal Bhakti Kecamatan Kembayan. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol. 10, No. 3, h 367-379.

infrastruktur, seperti pembangunan waduk Gajah Mungkur di Wonogiri dan waduk Mrica di Jawa Tengah. Dalam hal peningkatan taraf hidup, transmigrasi berhasil membuka kesempatan bisnis serta menciptakan pekerjaan untuk sekitar 8,8 juta orang, tanpa menghitung dampak tidak langsung dari pertumbuhan ekonomi akibat aktivitas yang dilakukan oleh para transmigran. Program transmigrasi juga berfungsi sebagai alat untuk mengatasi tantangan pengangguran yang merupakan salah satu masalah utama di Indonesia. Sebagai bagian investasi jangka panjang, program ini terus berlanjut dengan fokus pada daerah yang masih memiliki kepadatan penduduk rendah serta lahan yang bisa dimanfaatkan.³⁶

Menurut buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI pada tahun 2023 mengenai “*Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer*”, moderasi beragama dapat dipahami sebagai sudut pandang, sikap, serta pengamalan agama dalam kehidupan bersama yang mencerminkan esensi ajaran agama dengan tujuan melindungi martabat manusia dan menciptakan kebaikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks Islam, konsep ini dikenal sebagai *wasatiyyah*, yang berarti posisi tengah antara dua kutub ekstrem, yaitu liberalisme dan radikalisme. Pendekatan ini mengedepankan keseimbangan, keadilan, dan toleransi. Dari segi nilai, moderasi beragama tidak hanya sebuah teori, tetapi merupakan nilai praktis yang bertujuan untuk menanamkan perdamaian. Ini selaras dengan konsep *Maqasid al-Shari'ah*, yang menunjukkan bahwa agama dimaksudkan untuk melindungi lima aspek

³⁶ Rozi, F., Daulay, M., & Nasution, K. (2025). *Dinamika Transmigrasi di Desa Makmur Jaya: Sejarah, Perkembangan, dan Dampaknya. Local History & Heritage*, Vol. 5, No.1, h 23-30.

penting: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Masyarakat transmigrasi, seperti yang terdapat di Desa Pontian Mekar, bisa dilihat sebagai contoh kecil Indonesia yang kaya akan keragaman budaya.

Dalam wilayah ini, moderasi beragama berperan sebagai sarana untuk mengintegrasikan kehidupan sosial. Beragam suku dan latar belakang agama dari para transmigran menuntut adanya kesadaran bersama untuk menghargai perbedaan tradisi. Moderasi berfungsi untuk mengharmonisasikan nilai-nilai agama dengan kearifan lokal sehingga perbedaan identitas dapat menjadi kekayaan budaya dan tidak menimbulkan konflik.³⁷

Dalam jurnal yang ditulis oleh Annisa Firdaus dan rekan-rekannya pada tahun 2021 mengenai “Penerapan Moderasi Beragama Di Masyarakat Desa Baru Kecamatan Batang Kuis”, mereka menjelaskan bahwa moderasi beragama, yang berasal dari istilah Arab *al-wasathiyah*, menunjukkan sikap yang seimbang (*tawazun*) dan adil (*i’tidal*) dalam menjalankan ajaran agama. Ide ini menekankan pentingnya komitmen yang kuat dalam beragama tanpa jatuh ke dalam ekstremisme, baik yang berlebihan (*tatharruf*) maupun yang meremehkan ajaran agama itu sendiri. Dalam praktiknya, moderasi beragama memiliki ciri-ciri utama seperti keadilan, keseimbangan, toleransi, kemudahan, dan penolakan terhadap kekerasan. Salah satu tantangan besar dalam menerapkan moderasi adalah munculnya paham radikalisme yang sering kali menyerang individu dengan pemahaman agama yang lemah. Kelompok yang berisiko adalah mereka yang cenderung mengikuti tanpa

³⁷ Kementrian Agama RI, *Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer* (Badan Litbang dan Diklat, 2023), h 10

memahami inti dari ajaran agama yang mereka anut. Oleh karena itu, penyebaran konsep moderasi yang benar sangat penting agar masyarakat tidak terjebak dalam pola pikir inklusif yang kaku atau perilaku ekstrem.³⁸

Dari artikel yang ditulis oleh Muhammad Ilham pada tahun 2025 dengan judul "Moderasi Beragama sebagai Landasan Dakwah Menuju Kehidupan Rukun di Suku Talang Mamak Indragiri Hulu Provinsi Riau" dapat dijelaskan bahwa moderasi beragama atau *wasathiyah* adalah sikap yang seimbang dan jauh dari ekstremisme, baik dalam keyakinan, praktik keagamaan, maupun hubungan sosial. Secara teologis, konsep moderasi ini berasal dari Al-Qur'an Surah *Al-Baqarah* ayat 143, yang menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan*, atau komunitas yang terpilih dan adil. Dalam komunitas tersebut, dakwah Islam membutuhkan pendekatan yang seimbang dan bijaksana, yaitu melalui moderasi beragama. Peranan moderasi beragama sangat penting sebagai fondasi dakwah yang efektif guna menciptakan kehidupan harmonis di kalangan masyarakat suku Talang Mamak.

Pendekatan dakwah yang moderat tidak hanya menghargai tradisi lokal, tetapi juga membantu membina hubungan yang harmonis antara Islam dan kearifan lokal. Suku Talang Mamak adalah masyarakat adat yang berada di Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan ikatan kuat terhadap tradisi nenek moyang mereka. Ciri utama dari komunitas ini mencakup sistem kepercayaan, harmoni dengan alam dan sosial, serta struktur kepemimpinan.

³⁸ Firdaus. A. (2021), Penerapan Moderasi Beragama Di Masyarakat Desa Baru Kecamatan Batang Kuis, *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 11, No. 2, h 194.

Dalam melakukan dakwah di antara masyarakat adat yang memiliki kearifan lokal yang dalam, suatu pendekatan yang bijak diperlukan agar tidak menimbulkan penolakan atau konflik. Moderasi beragama berfungsi sebagai penghubung antara ajaran Islam dan tradisi yang ada.³⁹

Menurut penulisan Skripsi Fitria Ramadani, ” *Implementasi Moderasi Beragama Pada Masyarakat Islam dan Hindu di Desa Rejo Binangun*” Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, Fakultas Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, mengatakan bahwa moderasi beragama merupakan cara pandang atau sikap beragama yang mengambil jalan tengah untuk mencapai keseimbangan. Sikap ini mengedepankan keseimbangan dalam aspek keyakinan, moral, dan watak sebagai ekspresi keagamaan individu atau kelompok di tengah keberagaman masyarakat. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak akan bersikap ekstrem atau berlebih-lebihan dalam menjalankan ajaran agamanya.⁴⁰ Moderasi beragama di Indonesia diukur melalui empat indikator utama yang menjadi standar keberhasilan implementasinya:

1. Komitmen Kebangsaan: Sejauh mana cara pandang keagamaan seseorang selaras dengan ideologi negara, terutama dalam menerima Pancasila sebagai dasar bernegara

³⁹ Ilham. M. (2025), Moderasi Beragama sebagai Landasan Dakwah Menuju Kehidupan Rukun di Suku Talang Mamak Indragiri Hulu Provinsi Riau. *Jurnal Syntax Idea*, Vol. 6, No. 2, h 154.

⁴⁰ Fitra Ramadani, *Implementasi Moderasi Beragama Pada Masyarakat Islam dan Hindu di Desa Rejo Binangun* (Lampung, IAIN Metro, 2023).

2. Toleransi: Sikap saling menghargai dan memberi ruang kepada orang lain untuk berkeyakinan serta mengekspresikan pendapatnya, meskipun berbeda dengan keyakinan pribadi.
3. Anti Kekerasan dan Anti Radikalisme: Menolak penggunaan cara-cara kekerasan atau ideologi radikal yang bertujuan memaksakan perubahan melalui perpecahan antar bangsa.
4. Penerimaan Terhadap Tradisi: Kesiapan untuk menerima dan mengakomodasi praktik keagamaan yang beririsan dengan kebudayaan serta tradisi lokal tanpa menghilangkan esensi ajaran agama.

G. Sistematika Penulisan

Pada Skripsi yang berjudul “Sejarah Transmigrasi Dan Pengaruhnya Terhadap Moderasi Beragama di Desa Pontian Mekar Kabupaten Indragiri Hulu” Sebagai pedoman untuk memudahkan penulis dalam menyusun proposal penelitian, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut. Bagian pertama membahas Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan judul, metode penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua, dalam penelitian ini membahas tentang deskripsi ringkas mengenai Desa Pontian Mekar. Deskripsi ringkas penelitian ini akan menguraikan tentang gambaran umum Desa Pontian Mekar, dengan kondisi sosial budaya dan kondisi sosial keagamaannya. Kemudian membahas latar belakang transmigrasi di Indonesia, dalam bagian ini akan dijelaskan tentang Sejarah awal terjadinya transmigrasi di Indonesia.

Selanjutnya pada bab ketiga, akan menjelaskan dua poin utama, pertama adalah menjelaskan dan menguraikan tentang bagaimana Sejarah masuknya transmigrasi ke Desa Pontian Mekar. Pada bab ini Penulis akan memaparkan bagaimana sejarah transmigrasi masuk ke Provinsi Riau hingga ke Desa Pontian Mekar, lalu jenis-jenis transmigrasi di Desa Pontian Mekar, kemudian apa saja hak-hak yang diterima oleh transmigran dari pemerintah, serta bagaimana upaya awal masyarakat transmigran membangun kehidupan di Desa Pontian Mekar. Pada poin kedua akan membahas pengaruh transmigrasi terhadap kehidupan moderasi beragama di Desa Pontian Mekar, pada bagian ini akan diuraikan pengertian moderasi beragama, moderasi beragama di Desa Pontian Mekar, kemudian faktor pendukung dan tantangan moderasi beragama di Desa Pontian Mekar yang didalamnya akan dijelaskan juga mengenai praktik-praktik nyata moderasi beragama di Desa Pontian Mekar.

Pada bab keempat atau bagian terakhir adalah bagian yang berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan rangkuman poin-poin penting sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian. Sedangkan saran berisi ulasan berupa masukan atau rekomendasi praktis maupun akademis dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah disusun.